

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi tahun 1998 partai politik memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi kaderisasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (*eksekutif*), perwakilan (*legislatif*), dan peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Kaderisasi bagi partai politik merupakan upaya yang penting, karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kecakapan berorganisasi yang optimal. Kaderisasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kaderisasi.

Praktek kaderisasi partai politik masih jauh dari harapan, karena kegagalan kaderisasi tersebut banyak partai politik melahirkan kader-kader partai yang instan. Kader partai yang instan inilah membuat wajah hitam parlemen di DPRD dan di pemerintahan. Matinya kaderisasi di tubuh partai politik ini karena partai tidak mempunyai ideologi dan visi yang jelas. Maka dari itu sangat sulit untuk merekrut anggota. Dalam perekrutan perlu pesan yang dapat menarik perhatian orang dan dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dalam partai. Tanpa dasar ideologi yang kuat pesan yang meyakinkan sangat sulit dikembangkan.

Sebagai wujud implikasi dari penelitian ini, kaderisasi sebaiknya lebih bermakna learning proses ketimbang education school. Kaderisasi seperti itu lebih terfokus kepada kader ketimbang pada instrukurnya, bukan jumlah kader yang menjadi target tetapi proses kualitas nalarnya, lebih kepada self development ketimbang intruksi, agar partai politik tidak dinilai hanya sebagai sebuah jualan politik ketika menjelang pemilu legislatif, sebaliknya harus ada proses kaderisasi bagi kader partai sehingga memahami betul

hakikat dan perjuangan partai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang jelas dan demokratis.

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Akan tetapi banyak partai politik yang bisa menciptakan kemampuan kompetitifnya, namun sedikit yang dapat menjaga daya kompetitifnya sehingga berkesinambungan atau bertahan lama. Kesalahan utamanya karena mereka tidak mampu memelihara dan menghasilkan keunggulan kompetitif serta mewariskannya kepada generasi selanjutnya, atau yang bisa disebut dengan kaderisasi.

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kader adalah anggota, penerus organisasi. Kader harus meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi. Organisasi, apapun itu mutlak mensyaratkan kaderisasi. Terlebih lagi bagi partai politik, kaderisasi merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah regenerasi.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak partai-partai besar yang dianggap

gagal dalam kaderisasinya. Salah satu indikasinya adalah adanya kader partai yang meloncat ke partai yang lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Realita telah menunjukkan beberapa kadernya telah mengundurkan diri dan terjerat beberapa kasus.

Menurut Firmanzah (2008, hlm. 70), menyebutkan bahwa Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Selain melakukan proses rekrutmen, di dalam tubuh parpol perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Lebih lanjut dikatakan Firmanzah, bahwa sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang kepartaian tersebut, tentu lebih

menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri. Anggota Partai Gerindra adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.

Kader Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra, memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi Partai Gerindra, aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Gerindra.

Struktur Partai Gerindra terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Pimpinan Ranting (PR).

Dalam UU No.2 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) tentang Partai Politik menyatakan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akan tetapi ini banyak tidak diterjemahkan secara jelas dalam AD/ART partai, sehingga muncul kelonggaran aturan main yang sangat terbuka untuk dipelintir atau memicu berbagai interpretasi yang saling bertentangan. Di sisi lain, AD/ART juga tidak cukup menciptakan instrumen yang jelas, detail, dan lebih terbuka bagi keterlibatan yang signifikan dari para anggota partai. Ini terjadi karena tidak ada standar yang jelas dalam aturan-aturan internal partai dalam mengelola momen-momen ini. Artinya perseteruan seringkali muncul karena perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan AD dan ART partai.

AD/ART perlu disusun untuk memberikan panduan batasan yang lebih jelas dalam menunjukkan kualifikasi yang jelas bagi anggota baru, pengurus, dan calon yang akan dipromosikan dalam jabatan publik atau politik oleh

partai. Ini penting untuk menghindari berbagai penafsiran yang beragam terhadap konstitusi partai, yang ujung-ujungnya kerap kali menjadi milik pengurus atau fraksi-fraksi terkuat dalam partai. Dengan kata lain, diperlukan AD/ART yang lebih mampu menjawab problem sistemik bagi agenda demokratis internal partai.

Pengaturan lain yang juga butuh dipastikan dalam regulasi adalah memastikan rekrutmen anggota baru dan pergantian kepemimpinan partai. Kaderisasi anggota baru tidak bisa dilakukan secara spontan apalagi semata untuk menghadapi momen pemilu.

Menurut Cheppy Haricahyono (1991, hlm. 191), Berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya.

Lembaga riset Populi Center melakukan survei tingkat elektabilitas parpol selama tahun 2014. Elektabilitas PDIP masih tertinggi saat ini dengan 29,2 persen, diikuti Gerindra 15,4 persen dan Golkar 10,8 persen. Namun di daerah terdampak asap, elektabilitas Gerindra melebihi PDIP, kata peneliti Populi Center, Nona Evita, dalam paparan hasil surveinya di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2014).

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka di seluruh 34 provinsi di Indonesia mulai dari tanggal 15 Oktober sampai 22 Oktober

2014. Besaran sampel adalah 1.200 responden, dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error survei ini sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut hasil survei Populi Center selengkapnya:

1. PDIP: Januari: 31,1%, Oktober: 29,2%
2. Gerindra: Januari: 12,8%, Oktober: 15,4%
3. Golkar: Januari: 12,5% Oktober: 10,8%
4. PD: Januari: 4,3%, Oktober: 6,3%
5. PKB: Januari: 7,4%, Oktober: 4,9%
6. NasDem: Januari: 3,8%, Oktober: 4,1%
7. PPP: Januari: 2,4%, Oktober: 2,8%
8. PAN: Januari: 2,3%, Oktober: 2,2%
9. PKS: Januari: 4,2%, Oktober: 2,2%
10. Hanura: Januari 1,7%, Oktober: 0,3%
11. PBB: Januari 0,7%, Oktober: 0,2%
12. PKPI: Januari 0,2%, Oktober: 0,1%
13. Tidak tahu/tidak jawab: Januari 16,5%, Oktober: 21,4%

Maka disimpulkan bahwa setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap popularitas dan elektabilitas partai politiknya. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi popularitas dan elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas.

Penyebab adanya kegagalan kaderisasi adalah karena partai ingin segala sesuatu selalu cepat atau instan. Sebab, kaderisasi memerlukan waktu yang panjang seperti setelah menjadi pengurus partai harus bertingkat dari level tingkat desa, kecamatan, nasional, dan setelah itu menjadi calon pejabat publik.

Melalui fungsi kaderisasi, partai politik bertanggung jawab dalam

melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi partai. Caranya bisa melalui diskusi, seminar-seminar, hingga mengikuti suatu pemilihan untuk menjabat jabatan tertentu. Dengan ini partai juga dapat mencegah bentuk kepemimpinan negara yang oligarkis, karena partai menjamin adanya partisipasi politik dari setiap elemen masyarakat untuk menduduki kepemimpinan politik berdasarkan kriteria dan bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap individu.

Karena ketika kaderisasi partai politik gagal, maka yang akan terjadi adalah nilai-nilai partai politik tidak sampai kepada generasi berikutnya. Generasi tua akan selalu memikul beban sejarah sendiri selamanya. Terjadinya rangkap jabatan, sulit suksesi (pergantian) pengurus karena tidak ada yang bersedia mengabdikan diri bagi organisasi sosial, anggota yang merasa tertipu karena kenyataan tidak semanis yang dijanjikan kemudian meninggalkan organisasi, kegiatan atau program kerja tidak berjalan, eksistensi di masyarakat menurun, dan akhirnya apabila tidak ada perbaikan, organisasi tersebut akan dilupakan dan tidak menutup kemungkinan bubar.

Logikanya sederhana, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu *product* yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola kaderisasi dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu *product* yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.

Elektabilitas partai politik sangat mempengaruhi masyarakat, istilah-istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas. Dalam masyarakat sering diartikan, orang yang memiliki popularitas dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Wengki Saputra pada tahun 2012 dengan judul pola rekrutmen partai politik dalam menetapkan caleg pada pemilu legislatif, dengan hasil penelitian ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen partai politik yaitu: pertama, penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, partai politik menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri. Kedua, Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai partai politit. Ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan masih banyak yang belum S1, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi. Ketiga, kontrol rekrutmen politik dilakukan pada bakal calon legislatif dari internal dan eksternal partai. Ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut Caleg, antara lain banyak Balon yang meminta nomor urut kecil, meminta Dapil, dan *black campaign*.

Maka diasumsikan bahwa setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap elektabilitas partai politiknya. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **FUNGSI DAN PERAN KADERISASI DALAM MENINGKATKAN POPULARITAS DAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI MASYARAKAT (Studi Deskriptif Terhadap Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peran kaderisasi di Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu.

2. Kaderisasi dapat meningkatkan kualitas popularitas dan elektabilitas dikalangan masyarakat.
3. *Output* kaderisasi Partai Politik masih jauh dari harapan, karena kegagalan kaderisasi tersebut banyak Partai Politik melahirkan kader-kader partai yang instan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang secara umum permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan peran kaderisasi yang dijalankan Ranting Partai Gerindra di Dapil 2 Kabupaten Indramayu?
2. Apakah dengan fungsi dan peran kaderisasi Ranting Partai Gerindra di Dapil 2 Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas dimasyarakat?
3. Bagaimana bentuk kaderisasi Partai Gerindra di Dapil 2 Kabupaten Indramayu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk memperoleh informasi dan gambaran secara lengkap mengenai fungsi dan peran kaderisasi dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas di kalangan masyarakat Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu. Yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang:

1. Fungsi dan peran kaderisasi Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu.
2. Dengan adanya fungsi dan peran dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas dimasyarakat Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu.
3. Mengetahui bentuk kaderisasi Partai Gerindra

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

bagi dunia pendidikan, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam materi tentang partai politik, khususnya fungsi dan peran kaderisasi partai politik terhadap popularitas dan elektabilitas partai politik di masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan.

c. Bagi Ranting Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Indramayu

Sebagai pembuktian nyata penerapan demokrasi sekaligus bentuk transparansi Partai Gerindra kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat sekaligus sebagai pendidikan politik baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Soekanto (2009, hlm. 212-213), Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
2. Menurut Hafild Cangara (2008, hlm. 25) menjelaskan bahwa "kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik".
3. Menurut Carl J. Friedrich (dalam prof. Miriam Budiarjo, 2008, hlm. 404) menjelaskan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merbut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the futher objective of giving to members of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*).
4. Menurut Poerwadarminta (2006, hlm. 907) berpendapat bahwa popularitas berasal dari kata popular, artinya dikenal dan disukai orang banyak.
5. Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006, hlm. 22) mengartikan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

G. Sistematika Skripsi

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan penelitian disajikan dalam sistematika skripsi berikut dengan pembahasannya. Sistematika skripsi penelitian ini disusun sebagai berikut:

a. **Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang penelitian berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta di lapangan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

b. **Bab II Kajian Teori**

Bab II ini berisi tentang kajian teori (mengenai variabel penelitian yang diteliti), Analisis dan pengembangan materi yang diteliti (mencakup keluasan dan kedalaman materi, karakteristik materi, bahan dan media, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi).

c. **Bab III Metode Penelitian**

Bab III ini berisi tentang deskripsi mengenai metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

d. **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan tentang hasil dan temuan penelitian (mendeskripsikan hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diterapkan), pembahasan penelitian (membahas tentang hasil dari temuan penelitian).

e. **Bab V Simpulan dan Saran**

Bab ini menyajikan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan peneliti.

